

Penolakan Masyarakat terhadap Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng sebagai Manifestasi Konflik Lingkungan dan Strategi Manajemen Konflik

Divani Aulia Zulka¹

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
Divaniauliazulka22@gmail.com

Rifky Shihabudin²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
6670220094@untirta.ac.id

ABSTRACT

The conflict over cement factory development in the Kendeng Mountains arose due to differing interests among local communities, the government, and corporations. Local communities seek to preserve the environment, while the government and corporations focus on economic development. This study aims to analyze the conflict dynamics and examine the conflict management strategies used in its resolution. The research employs a literature review method using scientific journals and articles published between 2020 and 2025. The findings indicate that the conflict is influenced by differences in interests, low trust among stakeholders, and ineffective communication. Therefore, a more participatory conflict management approach through dialogue and community involvement in decision-making is needed.

Keywords: *Conflict management, Environmental Conflict, Kendeng Mountains.*

LATAR BELAKANG

Pembangunan industri sering dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas investasi, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, proses pembangunan tidak selalu berjalan tanpa hambatan karena sering kali menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang terdampak secara langsung. Kondisi tersebut terlihat dalam kasus pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Masyarakat Kendeng menolak pembangunan pabrik karena khawatir aktivitas penambangan batu kapur akan merusak kawasan karst yang selama ini menjadi sumber mata air dan penopang aktivitas pertanian warga. Di sisi lain, pemerintah dan perusahaan memandang pembangunan pabrik semen sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi daerah. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik lingkungan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang (Hasanah & Oktaviana, 2024; Huwaina et al., 2024).

Pegunungan Kendeng merupakan kawasan karst yang memiliki fungsi ekologis penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Kawasan ini berperan sebagai daerah resapan air sekaligus penyimpan cadangan air tanah yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan pertanian. Sebagian besar masyarakat di wilayah Kendeng bekerja

sebagai petani sehingga keberlangsungan lingkungan menjadi faktor yang sangat menentukan kehidupan mereka. Kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan mendorong munculnya berbagai bentuk penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut dilakukan melalui demonstrasi, gugatan hukum, audiensi dengan pemerintah, hingga aksi cor kaki yang menjadi simbol perlawanan masyarakat Kendeng terhadap pembangunan pabrik semen (Talitha et al., 2025; Afriyanti & Luthfi, 2025).

Konflik Kendeng tidak hanya berkaitan dengan pembangunan industri semata, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat. Bagi masyarakat Kendeng, kawasan karst memiliki nilai penting karena menjadi penyangga ekosistem dan sumber air yang mendukung aktivitas pertanian. Sebaliknya, pemerintah dan perusahaan melihat kawasan tersebut sebagai lokasi yang memiliki potensi ekonomi untuk mendukung pembangunan industri semen. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Dalam perkembangannya, konflik tidak hanya terjadi pada tingkat lokal, tetapi juga menarik perhatian publik nasional karena melibatkan isu lingkungan, hak masyarakat, dan kebijakan pembangunan (Hasanah & Oktaviana, 2024; Talitha et al., 2025).

Bentuk aksi yang dilakukan masyarakat sebagai wujud penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Aksi cor kaki yang dilakukan menjadi salah satu simbol perjuangan masyarakat dalam mempertahankan lingkungan hidup dan sumber penghidupan mereka. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan jalur hukum serta berbagai forum dialog untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konflik Kendeng berkembang menjadi gerakan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, konflik Kendeng tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup mereka (Afriyanti & Luthfi, 2025; Talitha et al., 2025).

Tabel 1. Gambaran Umum Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng

ASPEK	KETERANGAN
LOKASI KONFLIK	Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah
PIHAK YANG TERLIBAT	Masyarakat Kendeng, Pemerintah, dan PT Semen Indonesia
PENYEBAB KONFLIK	Rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu kapur
BENTUK KONFLIK	Demonstrasi, gugatan hukum, aksi cor kaki
ISU UTAMA	Perlindungan lingkungan dan sumber mata air
DAMPAK YANG DIKHAWATIRKAN	Kerusakan kawasan karst dan terganggunya sektor pertanian

Sumber: Diolah dari Hasanah dan Oktaviana (2024), Huwaina dkk. (2024), Talitha dkk. (2025), dan Afriyanti & Luthfi (2025).

Secara konseptual, konflik yang terjadi dalam pembangunan pabrik semen di

Kendeng dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Galtung (1996), konflik terdiri dari *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*. Dalam kasus konflik Kendeng, terdapat adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan yang menimbulkan konflik. Konflik Kendeng memiliki sikap, persepsi dan tingkat kepercayaan yang muncul antara aktor yang terlibat dalam konflik sehingga menimbulkan banyak sikap dan persepsi. Sepanjang konflik berlangsung mengacu pada tindakan yang dilakukan selama masa konflik, adanya gugatan dari masyarakat, aksi perlawanan.

TINJAUAN PUSTAKA

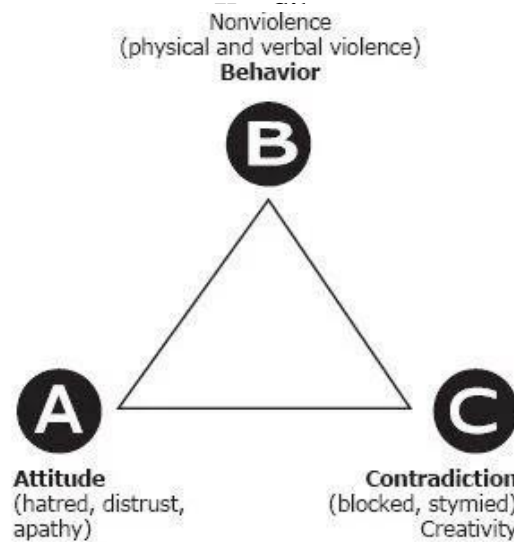
Penelitian mengenai konflik Kendeng telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda-beda. Huwaina dkk. (2024) mengkaji konflik Kendeng melalui perspektif konflik tenurial dan menemukan adanya pertentangan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hasanah dan Oktaviana (2024) lebih berfokus pada aspek hukum dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan pabrik semen. Sementara itu, Talitha dkk. (2025) membahas upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Kendeng dan PT Semen Indonesia melalui pendekatan resolusi konflik. Penelitian Afriyanti dan Luthfi (2025) juga menyoroti faktor-faktor kebijakan yang memengaruhi dinamika konflik pembangunan di Pegunungan Kendeng. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik Kendeng telah banyak dikaji dari perspektif lingkungan, hukum, dan kebijakan publik.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas konflik Kendeng melalui perspektif manajemen konflik masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penyebab konflik, dampak lingkungan, dan gerakan sosial masyarakat. Padahal, analisis mengenai bagaimana konflik berkembang, bagaimana hubungan antar aktor terbentuk, serta bagaimana strategi pengelolaan konflik dilakukan juga penting untuk dipahami. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng melalui perspektif manajemen konflik.

Segitiga Konflik by Johan Galtung

Penelitian ini menggunakan Teori Segitiga Konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung sebagai landasan analisis. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terdiri atas tiga unsur utama, yaitu *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*. *Contradiction* merujuk pada pertentangan kepentingan yang terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. *Attitude* berkaitan dengan sikap, persepsi, dan tingkat kepercayaan yang muncul di antara pihak-pihak yang berkonflik. Sementara itu, *behavior* mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan selama konflik berlangsung, seperti demonstrasi, gugatan hukum, maupun bentuk perlawanan lainnya. Melalui teori tersebut, konflik Kendeng dapat dianalisis secara lebih komprehensif karena tidak hanya melihat penyebab konflik, tetapi juga sikap dan tindakan yang muncul selama konflik berlangsung.

Gambar 1. Model Segitiga



Lebih lanjut, Galtung menjelaskan bahwa kontradiksi, sikap dan perilaku menjadi tiga elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk sebuah konflik secara menyeluruh. Keberadaan kontradiksi tanpa diikuti oleh sikap dan perilaku konflik menunjukkan adanya konflik laten yang bersifat struktural. Oleh karena itu, model segitiga konflik tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis konflik, tetapi juga sebagai kerangka untuk memahami manifestasi kekerasan yang timbul dalam konflik, meliputi kekerasan secara langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*structural violence*), dan kekerasan kultural (*cultural violence*).

Dalam konflik Kendeng, konsep Galtung memahami bahwa adanya kontradiksi, sikap dan perilaku yang berujung pada kekerasan yang terjadi pada masyarakat. Adanya demonstrasi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan, masyarakat melakukan demonstrasi dalam berbagai bentuk seperti aksi simbolik yang dilakukan di depan istana negara. Adanya kekerasan struktural yang terjadi pada konflik tersebut seperti kekerasan antara masyarakat dan negara yang berkompromi dengan perusahaan (Hasan, 2024).

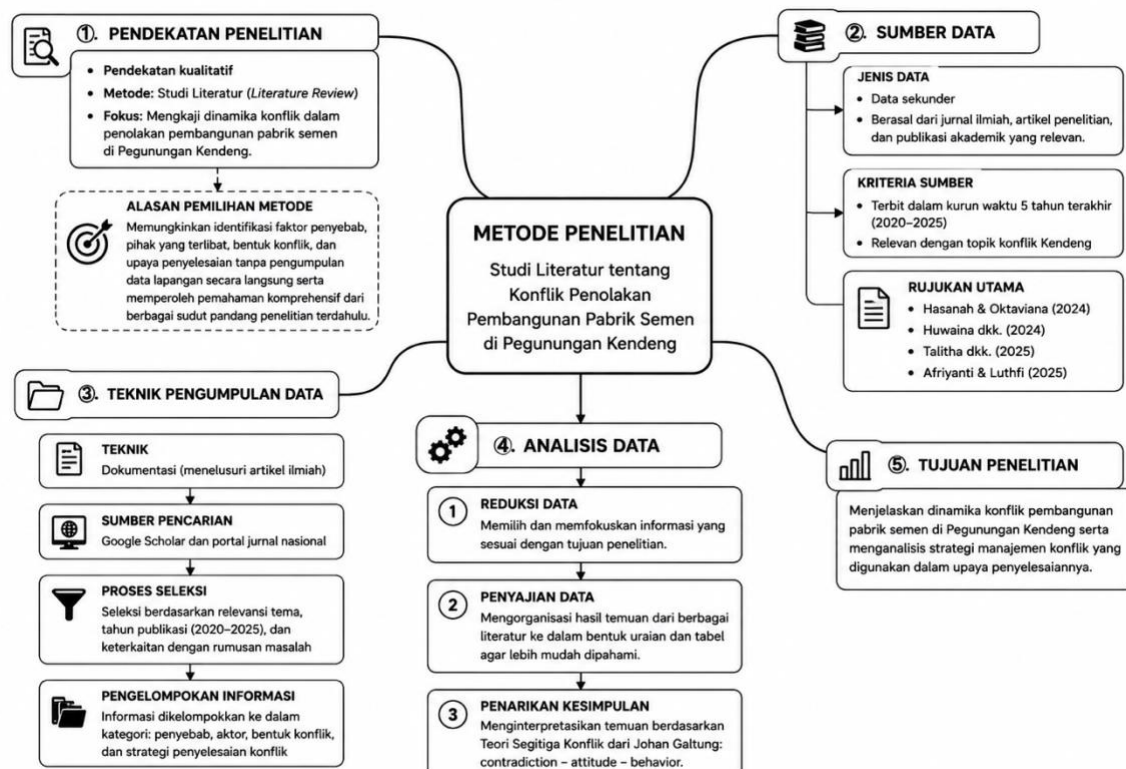
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika konflik yang terjadi dalam penolakan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng serta bagaimana strategi manajemen konflik yang dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan serta mengkaji strategi manajemen konflik yang digunakan dalam penyelesaian konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sumber data *literature review* atau studi literatur. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian berbagai hasil penelitian terdahulu untuk memahami dinamika konflik dalam penolakan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat, serta berbagai upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Pendekatan studi literatur juga dinilai sesuai karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif berdasarkan berbagai sudut pandang yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik yang relevan dengan topik konflik Kendeng. Untuk menjaga relevansi data, penelitian ini menggunakan sumber pustaka yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020–2025. Beberapa artikel yang menjadi rujukan utama antara lain penelitian Hasanah dan Oktaviana (2024), Huwaina dkk. (2024), Talitha dkk. (2025), serta Afriyanti dan Luthfi (2025). Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kesesuaian topik dengan fokus penelitian, yaitu konflik pembangunan, konflik lingkungan, dan manajemen konflik dalam kasus pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Gambar 2. Matriks Metode Penelitian



Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai artikel ilmiah yang diperoleh dari basis data akademik seperti *Google Scholar* dan portal jurnal nasional. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tema, tahun publikasi, serta keterkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Setelah proses seleksi dilakukan, informasi yang berkaitan dengan penyebab konflik, aktor yang terlibat, bentuk konflik, dan strategi penyelesaian konflik dikelompokkan ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dengan mengorganisasi hasil temuan dari berbagai literatur ke dalam bentuk uraian dan tabel agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan temuan berdasarkan Teori Segitiga Konflik dari Johan Galtung yang meliputi *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan dinamika konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng sekaligus menganalisis strategi manajemen konflik yang digunakan dalam upaya penyelesaiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng berawal dari adanya perbedaan kepentingan yang mendasar antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan. Masyarakat Kendeng memandang kawasan karst sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis dan sosial yang sangat penting. Kawasan ini tidak hanya menjadi sumber cadangan air yang menopang aktivitas pertanian dan kebutuhan domestik masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari identitas sosial dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, keberadaan kawasan karst dipandang sebagai aset lingkungan yang harus dijaga keberlanjutannya demi menjamin kelangsungan hidup generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Di sisi lain, pemerintah dan perusahaan melihat kawasan Kendeng sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang besar karena kandungan batu kapur yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama industri semen. Dari perspektif pembangunan, investasi industri semen dianggap mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan infrastruktur pendukung. Perbedaan cara pandang terhadap pemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian menjadi pemicu utama munculnya konflik antara para pihak yang terlibat.

Penolakan masyarakat semakin menguat ketika muncul kekhawatiran bahwa aktivitas penambangan batu kapur dan pembangunan pabrik semen akan mengganggu keseimbangan ekosistem karst. Masyarakat menilai bahwa eksploitasi kawasan karst

berpotensi menyebabkan berkurangnya ketersediaan air tanah, rusaknya daerah resapan air, menurunnya produktivitas pertanian, serta mengancam keberlangsungan mata pencaharian yang selama ini bergantung pada sektor agraris. Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh karakteristik kawasan karst yang memiliki fungsi hidrologi penting sebagai penyimpan dan penyalur air bagi masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng.

Konflik yang terjadi kemudian berkembang dari sekadar perbedaan pendapat menjadi konflik sosial-lingkungan yang melibatkan berbagai aktor, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis lingkungan. Berbagai bentuk perlawanan dilakukan oleh masyarakat, mulai dari demonstrasi, kampanye publik, advokasi lingkungan, hingga gugatan hukum terhadap kebijakan perizinan yang dianggap tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Aksi simbolik seperti gerakan cor kaki yang dilakukan oleh petani Kendeng juga menjadi bentuk ekspresi penolakan yang menarik perhatian publik nasional dan memperluas dukungan terhadap gerakan perlindungan lingkungan di kawasan tersebut.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Segitiga Konflik Johan Galtung, konflik Kendeng menunjukkan adanya kontradiksi (*contradiction*) berupa pertentangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan konservasi lingkungan. Kontradiksi tersebut kemudian melahirkan sikap (*attitude*) berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan, yang selanjutnya diwujudkan dalam perilaku (*behavior*) berupa berbagai tindakan protes dan perlawanan. Dengan demikian, konflik Kendeng tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik pembangunan industri, melainkan sebagai konflik multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa isu utama dalam konflik Kendeng terletak pada bagaimana menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal (Hasanah & Oktaviana, 2024; Huwaina et al., 2024).

Tabel 2. Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng

<i>Faktor Konflik</i>	<i>Penjelasan</i>
<i>Perbedaan kepentingan</i>	Masyarakat ingin menjaga lingkungan, sedangkan pemerintah dan perusahaan berorientasi pada pembangunan ekonomi
<i>Kekhawatiran lingkungan</i>	Potensi kerusakan kawasan karst dan berkurangnya sumber mata air
<i>Kurangnya kepercayaan</i>	Masyarakat meragukan jaminan perlindungan lingkungan dari pemerintah dan perusahaan
<i>Lemahnya komunikasi</i>	Dialog antara para pihak dinilai belum berjalan secara optimal

Sumber: Diolah dari Hasanah dan Oktaviana (2024), Huwaina dkk. (2024), dan Talitha dkk. (2025).

Berdasarkan Tabel 2, konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu perbedaan kepentingan, kekhawatiran lingkungan, kurangnya kepercayaan, dan lemahnya komunikasi antar aktor. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk dinamika konflik yang kompleks serta berkepanjangan.

Faktor pertama adalah perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Masyarakat Kendeng memprioritaskan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka, terutama sektor pertanian yang bergantung pada ketersediaan air dari kawasan karst. Sebaliknya, pemerintah dan perusahaan lebih menekankan aspek pembangunan ekonomi melalui investasi industri semen yang dianggap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menambah pendapatan daerah. Perbedaan orientasi ini menjadi akar kontradiksi yang memicu munculnya konflik.

Faktor kedua adalah kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Masyarakat menilai bahwa aktivitas penambangan batu kapur dan pembangunan pabrik semen berpotensi merusak ekosistem karst yang memiliki fungsi penting sebagai kawasan resapan dan penyimpan air. Kekhawatiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, isu lingkungan menjadi pusat perhatian dalam konflik Kendeng dan menjadi alasan utama munculnya gerakan penolakan.

Faktor ketiga adalah kurangnya kepercayaan (*trust deficit*) antara masyarakat dengan pemerintah maupun perusahaan. Masyarakat meragukan komitmen pemerintah dan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengelola dampak pembangunan secara bertanggung jawab. Rendahnya tingkat kepercayaan ini menyebabkan berbagai kebijakan, hasil kajian, maupun penjelasan yang diberikan oleh pemerintah dan perusahaan sering kali tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam perspektif manajemen konflik, rendahnya kepercayaan merupakan hambatan serius karena dapat mengurangi peluang tercapainya kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.

Faktor keempat adalah lemahnya komunikasi antar aktor. Dialog yang dilakukan selama proses pembangunan dinilai belum berjalan secara optimal dan belum mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Keterbatasan komunikasi menyebabkan munculnya kesalahpahaman, perbedaan persepsi, serta meningkatnya kecurigaan antar pihak. Kondisi ini memperkuat eskalasi konflik karena masyarakat merasa tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan lingkungan dan kehidupan mereka.

Dalam konsep yang digunakan oleh Galtung, faktor perbedaan kepentingan mencerminkan unsur *contradiction* (kontradiksi), yaitu adanya pertentangan tujuan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sementara itu, faktor kekhawatiran

lingkungan dan kurangnya kepercayaan menggambarkan unsur *attitude* (sikap), berupa persepsi negatif, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan terhadap pihak lain. Adapun lemahnya komunikasi berkontribusi terhadap munculnya *behavior* (perilaku konflik), yang kemudian diwujudkan dalam bentuk demonstrasi, gugatan hukum, kampanye publik, dan berbagai aksi penolakan lainnya. Dengan demikian, konflik Kendeng menunjukkan keterkaitan yang kuat antara ketiga unsur dalam segitiga konflik Galtung, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengatasi kontradiksi kepentingan, tetapi juga membangun kepercayaan dan memperbaiki komunikasi antar aktor.

Implikasinya, penyelesaian konflik Kendeng tidak cukup dilakukan melalui kebijakan administratif atau jalur hukum semata. Diperlukan strategi manajemen konflik yang berbasis dialog partisipasi, transparansi informasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar akar penyebab konflik dapat diselesaikan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Analisis Konflik Kendeng Berdasarkan Teori Segitiga Konflik Johan Galtung

Konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng dapat dianalisis menggunakan Teori Segitiga Konflik Johan Galtung yang terdiri atas unsur *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*. Unsur *contradiction* terlihat dari adanya pertentangan kepentingan antara masyarakat yang ingin mempertahankan lingkungan hidup dengan pemerintah dan perusahaan yang mendorong pembangunan industri. Dalam konteks ini, kedua pihak memiliki tujuan yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang sulit dihindari. Pertentangan tersebut menjadi dasar munculnya berbagai bentuk penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap pembangunan pabrik semen.

Selanjutnya, unsur *attitude* tercermin dari sikap dan persepsi yang berkembang selama konflik berlangsung. Masyarakat menunjukkan rasa khawatir dan ketidakpercayaan terhadap rencana pembangunan karena dianggap dapat mengancam keberlangsungan sumber air dan lahan pertanian. Di sisi lain, pemerintah dan perusahaan meyakini bahwa pembangunan pabrik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan hubungan antar aktor menjadi semakin renggang dan memperbesar potensi konflik yang terjadi. Adapun unsur *behavior* terlihat melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh para pihak selama konflik berlangsung. Masyarakat melakukan demonstrasi, aksi cor kaki, kampanye lingkungan, hingga gugatan hukum sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan pabrik semen. Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan proses pembangunan melalui berbagai kebijakan dan perizinan yang telah diterbitkan. Berbagai tindakan tersebut menunjang bahwa konflik Kendeng berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan aksi kolektif dari masyarakat dan respons dari pemerintah.

Gerakan kolektif dari masyarakat kendang melalui aksi simbolik, seperti pengecoran kaki sebagai bentuk perjuangan masyarakat dalam mempertahankan lingkungan hidup dan sumber penghidupan mereka. Aksi tersebut berhasil menarik

perhatian publik nasional sekaligus memperlihatkan bahwa konflik Kendeng telah berkembang menjadi isu sosial dan lingkungan yang mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Kehadiran media massa dan organisasi masyarakat sipil juga turut memperkuat posisi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka selama konflik berlangsung (Afriyanti & Luthfi, 2025).

Strategi Manajemen Konflik dalam Kasus Kendeng

Berdasarkan hasil kajian literatur, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Bentuk penyelesaian konflik yang paling banyak digunakan adalah dialog, mediasi, dan jalur hukum. Namun, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala karena masing-masing pihak tetap mempertahankan kepentingannya. Masyarakat menuntut perlindungan lingkungan dan sumber daya air, sedangkan pemerintah dan perusahaan berupaya melanjutkan pembangunan yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Dialog dilakukan untuk membuka ruang komunikasi dan mencari titik temu atas perbedaan kepentingan yang ada. Akan tetapi, efektivitas dialog sering kali terbatas karena adanya ketimpangan informasi dan perbedaan persepsi mengenai manfaat serta risiko pembangunan pabrik semen. Pemerintah dan perusahaan memandang proyek tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, masyarakat Kendeng melihat pembangunan pabrik semen sebagai ancaman terhadap kelestarian kawasan karst yang selama ini menjadi sumber mata air dan penopang utama aktivitas pertanian mereka.

Selain dialog, mekanisme mediasi juga pernah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Mediasi bertujuan untuk mempertemukan kepentingan para aktor yang berkonflik dan menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama. Namun, dalam praktiknya proses mediasi menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil kebijakan yang dihasilkan. Kondisi tersebut muncul karena masyarakat menilai bahwa aspirasi mereka belum sepenuhnya diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, mediasi lebih banyak berfungsi sebagai sarana komunikasi daripada sebagai instrumen penyelesaian konflik yang mampu menghasilkan kesepakatan jangka panjang.

Jalur hukum juga menjadi salah satu strategi yang menonjol dalam konflik Kendeng. Masyarakat bersama organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap sejumlah izin lingkungan yang dianggap berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis. Penggunaan mekanisme hukum menunjukkan bahwa konflik telah berkembang dari sekadar penolakan sosial menjadi sengketa kebijakan yang melibatkan aspek legal dan tata kelola pemerintahan. Meskipun beberapa putusan pengadilan memberikan ruang bagi perlindungan lingkungan, implementasi putusan tersebut sering kali menimbulkan

perdebatan baru sehingga konflik terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Segitiga Konflik Johan Galtung, konflik Kendeng memperlihatkan keterkaitan antara unsur kontradiksi (*contradiction*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*). Kontradiksi terlihat dari pertentangan kepentingan antara agenda pembangunan ekonomi dengan tuntutan perlindungan lingkungan. Sikap konflik tercermin dalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan, serta munculnya persepsi bahwa pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, perilaku konflik diwujudkan melalui demonstrasi, gugatan hukum, kampanye advokasi, hingga aksi simbolik berupa cor kaki yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng sebagai bentuk perlawanan terhadap pembangunan pabrik semen.

Berdasarkan dinamika tersebut, strategi manajemen konflik yang paling relevan untuk diterapkan adalah pendekatan kolaboratif (*collaborative conflict management*) yang menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi partisipasi, transparansi informasi, dan pengambilan keputusan yang inklusif. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi sekaligus meningkatkan legitimasi keputusan yang dihasilkan. Di samping itu, penyediaan kajian lingkungan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan.

Lebih lanjut, penyelesaian konflik Kendeng tidak dapat hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan harus mengintegrasikan dimensi sosial dan ekologis sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi manajemen konflik yang diterapkan tidak hanya bertujuan meredakan ketegangan antar aktor, tetapi juga menghasilkan solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat menciptakan penyelesaian konflik yang lebih adil, berkelanjutan, dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng merupakan konflik sosial-lingkungan yang muncul akibat pertentangan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam pemanfaatan kawasan karst. Masyarakat memandang kawasan Kendeng sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai sumber mata air dan penopang aktivitas pertanian, sedangkan pemerintah dan perusahaan melihat kawasan tersebut sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan investasi. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi faktor utama yang memicu konflik dan diperkuat oleh kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerusakan lingkungan, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap

pemerintah dan perusahaan, serta belum optimalnya komunikasi antar pihak yang terlibat.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Segitiga Konflik Johan Galtung, konflik Kendeng menunjukkan keterkaitan antara unsur contradiction, attitude, dan behavior. Unsur contradiction tercermin dari pertentangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Unsur attitude terlihat dari munculnya kekhawatiran, persepsi negatif, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun perusahaan. Sementara itu, unsur behavior diwujudkan melalui berbagai bentuk aksi penolakan, seperti demonstrasi, gugatan hukum, kampanye advokasi, dan aksi simbolik cor kaki yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng. Interaksi ketiga unsur tersebut menyebabkan konflik berkembang menjadi konflik terbuka yang berlangsung dalam jangka waktu panjang.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan melalui dialog, mediasi, dan jalur hukum, namun efektivitasnya masih terbatas karena belum mampu menyentuh akar permasalahan konflik secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi manajemen konflik yang lebih relevan dalam kasus Kendeng adalah pendekatan kolaboratif yang menekankan komunikasi partisipatif, transparansi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan antar pemangku kepentingan sekaligus menciptakan keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.

REFERENSI

- Afriyanti, R., & Luthfi, A. (2025). Advocacy coalition framework: Analisis parameter relatif stabil dalam rencana pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. *Warta Dharmawangsa*, 19(4), 2179–2195.
- Bramantyo, N. R., Sobandi, K. R., & Kusumanegara, S. (2024). Manajemen konflik dalam implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 tentang pemberdayaan desa wisata di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.
- Galtung, Johan. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Sage Publications.
- Hasan, N. (2024). Mengelola konflik dalam implementasi corporate social responsibility dan dampaknya terhadap lingkungan. *Environment Conflict*, 1(2).
- Hasanah, A., & Oktaviana, A. (2024). Analisis konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng menurut perspektif hukum dan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1321–1331.
- Huwaina, A., Prabawati, A., & Dewi, A. (2024). Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik Karl Marx). *Environment Conflict*, 1(1), 1–15.
- Mariska, R., & Minako, M. (2023). Manajemen konflik pembangunan tower Telkomsel dengan masyarakat di Kelurahan Talang Jambe Kota Palembang. *Indonesian Journal of Social Development*, 1(2).
- Talitha, D. N., Putri, Y., & Angela, D. (2025). Penyelesaian konflik antara masyarakat Kendeng Utara dan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*.